

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara pelantikan tersebut berlangsung lancar sejak sidang pelantikan dibuka hingga ditutup kembali oleh Ahmad Muzani selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sidang dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut berlangsung di Gedung MPR/DPR RI dan dihadiri oleh ratusan pejabat pemerintahan dan tamu undangan dari berbagai negara. Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian tugas kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selama 5 tahun ke depan. Selain itu, pelantikan tersebut juga serentak membuka kembali memori publik saat Prabowo-Gibran didera berbagai tuntutan konstitutif dari lawan politik mereka menjelang Pilpres 2024.

Dengan susah payah, pasangan ini mesti menghadapi berbagai kecaman dan tuntutan pengadilan dari lawan politik mereka karena dugaan pelanggaran konstitusi dalam pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Meski pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Gibran tidak melanggar konstitusi dan isu dinasti politik yang dituduhkan kepadanya tidaklah benar, maka ia tetap sah mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden. Namun, kontroversi pasangan ini tampaknya tidak berhenti sampai di sengketa Pilpres 2024 saja. Sebab, belum sah dilantik menjadi Presiden RI pun Prabowo sudah terlebih dahulu berulah dengan menunjukkan sikap menyepelekan keberadaan dan fungsi oposisi.

Beberapa bulan setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024, Prabowo tampil ke publik dengan narasi yang mengejutkan banyak pihak. Narasi itu ia lontarkan saat menghadiri acara silaturahmi bersama pengurus dan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Mei 2024 yang lalu. Saat berkesempatan memberikan pidato sebagai Presiden RI terpilih, Prabowo menyampaikan bahwa akan mengajak semua parpol di parlemen

untuk bergabung ke dalam kabinetnya. Ia menambahkan bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak membutuhkan oposisi melainkan kerja sama dari setiap pihak, sehingga ruang bagi “serang-menyerang” dalam dinamika berdemokrasi tidak diperlukan.¹ Prabowo bahkan memberi peringatan kepada parpol yang tidak mau diajak bekerja sama (baca: bergabung ke dalam koalisi) agar jangan mengganggu kerja pemerintah dan koalisinya. Tentu saja “gangguan” yang Prabowo maksudkan di sini ialah tugas dan peran parpol oposisi untuk mengoreksi, mempertanyakan, bahkan menggugat kebijakan pemerintah dan koalisinya, apabila ada kebijakan yang dianggap cacat dan mencurigakan oleh oposisi.

Niat Prabowo untuk melemahkan oposisi dengan cara menggandeng mayoritas parpol di parlemen tampaknya bukan sekedar wacana. Hal ini ia pertegas ulang pada acara penutupan Kongres ke-3 Partai Nasdem pada Agustus 2024. Saat memberi sambutan pada acara tersebut, Prabowo berujar bahwa oposisi bukanlah produk demokrasi Indonesia, melainkan berasal dari Eropa. Ia menambahkan bahwa demokrasi yang semestinya ada di Indonesia ialah demokrasi gotong royong.² Dari pernyataannya tersebut, dapat dipahami bahwa Prabowo memandang sebelah mata keberadaan dan fungsi oposisi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan politiknya ini tidak saja berimbas kepada gemuknya Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga mencerminkan kedangkalan pemahaman Prabowo-Gibran tentang oposisi, serta menandai awal dari upaya pelemahan oposisi di Indonesia.

Langkah politik Prabowo-Gibran untuk menghilangkan keberadaan dan melemahkan fungsi partai oposisi sontak menuai beragam komentar dari banyak pihak, terutama dari para pengamat politik dan pemerhati demokrasi di Indonesia. Romo Magnis Suseno SJ, misalnya, dalam salah satu sesi diskusi bertemakan: *Hukum Sebagai Senjata Politik*, guru besar filsafat di STF Driyakara itu berpendapat bahwa demokrasi akan runtuh dan lenyap apabila semua parpol di

¹ Pizaro Gozali Idrus, “Analisis Dan Aktivis HAM Nilai ‘Ancaman’ Prabowo Kepada Oposisi Berbahaya Bagi Demokrasi,” *Benar News Indonesia*, last modified 2024, diakses pada February 2, 2025, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aktivis-sebut-prabowo-ancam-demokrasi-05102024150142.html>.

² Novali Panji Nugroho, “Prabowo Sebut Oposisi Bukan Budaya Indonesia, Ajak Elite Partai Kolaborasi,” *Tempo. Co*, last modified 2024, diakses pada February 9, 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-sebut-oposisi-bukan-budaya-indonesia-ajak-elite-partai-kolaborasi-15063>.

parlemen mendekat ke pemerintahan³ dan tidak ada partai oposisi. Dengan kata lain, Romo Magnis juga hendak menyiratkan pesan bahwa partai oposisi adalah kunci bagi kemaslahatan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan partai oposisi mesti tetap ada di dalam sebuah sistem pemerintahan. Senada dengan itu, pendapat unik juga datang dari peneliti senior pada Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Pada sebuah *webinar* bertajuk “*Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*” yang diselenggarakan pada Senin, 29 April 2024 lalu, Noor mengatakan bahwa sebuah negara akan kuat dan bertahan apabila partai oposisi dapat memainkan perannya sesuai prinsip-prinsip berdemokrasi.⁴ Noor mengambil contoh negara-negara besar seperti Amerika Serikat justru dapat bertahan dan berkembang sampai saat ini berkat peran partai oposisi yang kuat. Di lain kesempatan, Noor juga pernah berpendapat bahwa oposisi adalah bagian integral dari demokrasi, sehingga oposisi menjadi salah satu bagian dari karakteristik demokrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵

Pandangan-pandangan tadi kurang lebih dapat menjadi sebuah penilaian objektif terhadap kebijakan politik yang diambil oleh Prabowo-Gibran, sebagai kebijakan yang keliru bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu, menurut penulis, ada dampak-dampak negatif bagi negara yang mesti diperhitungkan apabila partai oposisi dilemahkan dan bahkan dihilangkan dari sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena alasan-alasan itu, maka telah lahir banyak pemikir politik dan demokrasi yang mengkritik kebijakan tersebut, salah satunya datang dari pemikir Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid.

³ Fath Putra Mulya, “Romo Magnis Sebut Partai Oposisi Penting Untuk Demokrasi,” *ANTARA*, last modified 2024, diakses pada February 9, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4158918/romo-magnis-sebut-partai-oposisi-penting-untuk-demokrasi>.

⁴ Bagus Ahmad Rizaldi, “Peneliti Politik: Negara Akan Kuat Karena Oposisi Yang Kuat,” *ANTARA*, last modified 2024, diakses pada February 10, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4080222/peneliti-politik-negara-akan-kuat-karena-oposisi-yang-kuat>.

⁵ Firman Noor, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia,” *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2016): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/152332-ID-oposisi-dalam-kehidupan-demokrasi-arti-p.pdf>.

Cak Nur – demikian Nurcholish Madjid biasa disapa – berpendapat bahwa oposisi merupakan bagian integral dari demokrasi. Pendapatnya ini berangkat dari pengertian demokrasi sebagai sebuah ideologi terbuka, yang senantiasa memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan situasi negara dan masyarakat yang dinamis.⁶ Perubahan dan perkembangan tadi tidak dapat terlepas dari pengaruh partai oposisi, yang siap “berseteru” dengan pemerintah untuk menciptakan perubahan bagi sebuah negara. Selain itu, Nurcholish Madjid berpendapat pula bahwa oposisi adalah suatu kenyataan dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, jika kelompok oposisi tidak diakui kehadirannya, maka yang akan terjadi ialah mekanisme saling curiga dan mengelompokkan oposisi semata-mata sebagai ancaman yang berbahaya bagi pemerintah.⁷ Berangkat dari pandangan Nurcholish Madjid itu, penulis menilai bahwa oposisi menjadi bagian integral dari demokrasi dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kebijakan politik yang menyepelkan keberadaan dan peran oposisi di dalam sebuah pemerintahan adalah tindakan yang fatal bagi keberlangsungan demokrasi pada sebuah negara.⁸

Di samping itu, Nurcholish Madjid juga menambahkan bahwa demokrasi akan sehat bila tugas *check and balance* dalam sebuah bangsa dapat berjalan baik dan tentu saja tugas itu diperankan oleh kelompok oposisi.⁹ Peran sebagai pengawas (*check*) dan penyeimbang (*balance*) oleh partai oposisi berguna untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat luas. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Toyibi, dengan menyitir pernyataan Robert A. Dahl, bahwa peran sebagai pengawas dan penyeimbang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan fungsi partai oposisi.¹⁰ Dahl melanjutkan bahwa partai oposisi tidak hanya sebatas berfungsi mengawasi dan menyeimbangi langkah politis pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam

⁶ Budhy Munawar Rachman, “Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban,” in *Nurcholish Madjid* (Penerbit MIZAN, 2006), hlm. 2219.

⁷ *Ibid.*, 2332.

⁸ Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 260.

⁹ *Ibid.*, 261.

¹⁰ Vicko Wahyu Rifan Toyibi, “Peran Dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks and Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 534, <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/609/527>.

memengaruhi arah kebijakan publik.¹¹ Dengan kata lain, bila partai oposisi tidak ada, maka pemerintah dapat berbuat suka-suka terhadap rakyatnya. Akibatnya, akan timbul beberapa ancaman serius bagi stabilitas sebuah bangsa. Misalnya saja, tanpa kehadiran oposisi akan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis oleh pemerintah. Ancaman lain yang tidak kalah mengerikan ialah, suara rakyat tidak akan didengar karena semua keputusan berada di tangan elite politik. Di sini, Nurcholish Madjid hendak mengingatkan kita semua bahwa partai oposisi menjadi penyalur yang paling memungkinkan bagi suara-suara rakyat agar dapat sampai ke telinga penguasa (baca: pemerintah).

Nurcholish Madjid menambahkan bahwa ide oposisi yang ia gemakan bukanlah orisinal dari kepalanya, melainkan datang dari para pemikir besar lainnya, yang sudah terlebih dahulu mengalami dan mendalami arti dan peran oposisi bagi sebuah negara.¹² Dengan demikian, menurut Nurcholish Madjid, pentingnya oposisi bagi sebuah negara demokrasi bukanlah sebuah wacana tanpa dasar yang jelas, melainkan datang dari pengalaman negara-negara demokrasi lainnya. Di sini, penulis dapat merasakan kekhawatiran Nurcholish Madjid terhadap nasib bangsa ini, apabila pemerintah “berjalan” tanpa kontrol gara-gara hampir semua parpol merapat ke dalam koalisi pemerintah. Oleh karena pandangan Nurcholish Madjid tadi, maka pandangan politis Prabowo-Gibran yang menganggap remeh keberadaan dan peran oposisi dalam sistem demokrasi di Indonesia, adalah sebuah keputusan yang keliru dan dapat mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka lewat karya ilmiah ini, penulis hendak mengulas pentingnya partai oposisi bagi pemerintahan Probowo-Gibran dan membedah lebih dalam bahaya dari upaya pelemahan serta penghapusan partai oposisi yang sedang dipraktikan di negara demokrasi, seperti Indonesia. Masalah akan penulis bedah menggunakan pisau analisis dari Nurcholish Madjid, yakni berupa pandangannya tentang oposisi dengan judul: **URGENSI PARTAI**

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurcholish Madjid, “Oposisi Suatu Kenyataan,” in *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, ed. Edy A. Effendi and Nurcholish Madjid, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), 6.

OPOSISI BAGI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN MENURUT PERSPEKTIF OPOSISI NURCHOLISH MADJID.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah utama dari skripsi ini adalah: Seberapa urgen peran dan fungsi partai oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menurut pemikiran Nurcholish Madjid? Dari masalah utama ini, ada beberapa masalah turunan yang dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana konsepsi partai oposisi di Indonesia? *Kedua*, bagaimana konsep oposisi menurut Nurcholish Madjid? *Ketiga*, mengapa partai oposisi urgen bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menurut perspektif oposisi Nurcholish Madjid?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain; *Pertama*, memperluas wawasan penulis tentang pentingnya oposisi bagi sebuah negara demokrasi menurut Nurcholish Madjid. *Kedua*, untuk menjabarkan pentingnya keberadaan dan fungsi partai oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menurut konsep oposisi Nurcholish Madjid. *Ketiga*, karya ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lewat metode ini, penulis dituntut untuk menggali dan mengumpulkan berbagai tulisan Nurcholish Madjid seputar oposisi. Tulisan-tulisan yang memuat pemikiran Nurcholish Madjid seputar oposisi penulis temukan di dalam berbagai sumber misalnya, buku, jurnal, ensiklopedia, bahkan hasil wawancara yang termuat dalam beberapa media. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman seputar tema yang diangkat, penulis juga membaca berbagai literatur ilmiah lain – seputar konsep oposisi Nurcholish Madjid – yang sudah terlebih dahulu diulas oleh penulis lainnya dalam tulisan mereka. Kemudian, dengan pemahaman yang ada, penulis akan mendeskripsikan konsep oposisi Nurcholish Madjid dan mengelaborasinya lebih

lanjut dengan situasi dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai oleh penulis telah mengesampingkan keberadaan dan fungsi oposisi di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Saat mengulik *repository* dan arsip skripsi di rak-rak perpustakaan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero), penulis menjumpai dua skripsi yang mengangkat pokok pikiran Nurcholish Madjid. Adapun skripsi-skripsi tersebut antara lain berjudul; *“Toleransi dan Klaim Kebenaran Agama Menurut Nurcholish Madjid”* yang ditulis oleh Andreas Abraham Sigo pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut, Andreas coba mengangkat isu pluralisme di Indonesia yang memicu ketegangan antara klaim kebenaran agama dan tuntutan toleransi beragama. Andreas memilih untuk menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid dalam membedah persoalan ini di Indonesia. Sebab menurut Andreas, pemikiran Nurcholish Madjid tentang semangat toleransi dibangun atas dasar saling pengertian dan penghargaan terhadap realitas perbedaan. Selain itu, Nurcholish Madjid juga menekankan bahwa pelaksanaan nilai-nilai toleransi merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban ajaran sebuah agama.

Selain skripsi di atas, ada juga skripsi berjudul *“Universalisme Islam Nurcholish Madjid dan Implikasinya bagi Keterlibatan Sosial-Politik Islam di Indonesia”* yang ditulis oleh Antonius Andi K. K. Naga pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut, Antonius mengulas ide Nurcholish Madjid tentang universalisme Islam dan mencari implikasinya terhadap keterlibatan sosial-politik umat Islam di Indonesia. Dalam tulisannya, Antonius menyimpulkan bahwa universalisme Nurcholish Madjid dibangun di atas tiga pondasi, yakni Islam yang berarti sikap pasrah, sikap pasrah sebagai inti ajaran agama Islam, dan Islam sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi terdahulu. Dari ketiga argumen tadi, implikasi dari universalisme Nurcholish Madjid terlihat dalam persoalan sosial-politik Islam di tanah air yang dilatarbelakangi oleh pluralitas keagamaan di Indonesia.

Kemudian, penulis juga menemukan karya ilmiah lain yang berasal dari institusi luar, yakni berupa tesis yang mengangkat pokok pikiran Nurcholish Madjid mengenai oposisi. Karya-karya ilmiah itu antara lain: Tesis berjudul *“Oposisi dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid)”* ditulis oleh

Darwis pada 2021 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam tesis ini, Darwis menguraikan pemahaman Nurcholish Madjid tentang oposisi dalam perspektif Islam. Menurut penjelasan Darwis, Nurcholish Madjid menganggap bahwa keberadaan partai oposisi mutlak diperlukan agar kekuasaan pemerintah – yang tidak lepas dari kesalahan manusiawi – dapat dikontrol oleh oposisi.

Selain beberapa karya ilmiah tadi, dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan beberapa buku dan ensiklopedia yang memuat ide-ide Nurcholish Madjid, khususnya ide Nurcholish Madjid tentang oposisi. Adapun buku dan ensiklopedia yang akan menjadi referensi utama penulis dalam mengerjakan skripsi ini penulis maksud antara lain:

Pertama, ensiklopedi berjudul “*Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*” yang disunting oleh Budhy Munawar Rachman dan diterbitkan oleh Penerbit MIZAN, Yayasan Wakaf Paramadina, dan *Center for Spirituality and Leadership* (CSL) pada tahun 2006. Ensiklopedi tersebut memuat pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid, berupa esai dan opininya yang telah dipublikasikan di sejumlah media cetak maupun *online*. Selain tulisan-tulisan mengenai pandangan Nurcholish Madjid mengenai ajaran Islam, ensiklopedi tersebut juga memuat tema-tema mengenai politik, demokrasi, dan oposisi menurut pandangan Nurcholish Madjid.

Kedua, buku berjudul “*Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*” yang disunting oleh Budhy Munawar Rachman dan diterbitkan oleh Penerbit Nurcholish Madjid Society (NCMS) pada tahun 2019. Buku setebal 4925 halaman ini memuat sejumlah besar karya Nurcholish Madjid yang dibukukan. Karena itu, di dalam buku ini terdapat begitu banyak tema pembahasan, mulai dari pandangan Nurcholish Madjid mengenai ajaran Islam, situasi politik tanah air dan perkembangannya, serta isu-isu modernitas.

Ketiga, buku berjudul “*Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*” yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan diterbitkan oleh Penerbit Dian Rakyat pada tahun 1999. Dari banyaknya buku yang ditulis Nurcholish Madjid, buku ini menjadi salah satu sumber utama yang penulis gunakan dalam pengerjaan skripsi ini. Alasannya, buku ini memuat sejumlah esai dan opini Nurcholish Madjid terkait

sejumlah tema penting, antara lain keterkaitan antara ajaran Islam dengan politik. lebih lanjut, di dalam buku ini, Nurcholish Madjid mengelaborasi nilai-nilai keislaman ke dalam ide-ide demokrasi dan kekuasaan, termasuk konsep oposisi dalam politik.

Selain beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang telah disebutkan di atas, penulis juga mengeksplorasi lebih dalam pemikiran oposisi Nurcholish Madjid lewat berbagai artikel di jurnal-jurnal. Artikel-artikel itu dapat ditemukan lewat mesin pencari *Google Scholar*, *Publish or Perish*, atau *ProQuest* dengan memasukan kata kunci; Pandangan oposisi Nurcholish Madjid. Namun, artikel-artikel jurnal tersebut pada umumnya mengulas konsep politik Nurcholish Madjid dan hanya sedikit memberi ruang di dalam artikel untuk menjelaskan konsep oposisinya. Selain itu, penulis juga belum menemukan karya ilmiah lain yang mengulas urgensi partai oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid. Lebih dari itu, artikel-artikel yang penulis baca juga tidak sebatas seputar ide Nurcholish Madjid mengenai oposisi, melainkan juga artikel-artikel yang bertemakan oposisi dalam demokrasi, konsep partai oposisi, dan sejumlah artikel yang membahas situasi perpolitikan tanah air, khususnya pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

Atas alasan di atas, maka lewat tulisan ini, penulis hendak mengangkat pemikiran Nurcholish Madjid sebagai salah satu tokoh Islam di Indonesia, yang juga aktif menyumbangkan idenya tentang demokrasi dan oposisi. Pemilihan tokoh ini (Nurcholish Madjid) dalam membedah persoalan oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus memberi nilai kebaruan dalam skripsi ini. Mengingat sejauh ini, skripsi atau karya ilmiah yang mengulas pokok pikiran Nurcholish Madjid tentang oposisi sudah banyak bertebaran di berbagai media. Namun, karya ilmiah yang mengulas urgensi oposisi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif oposisi Nurcholish Madjid belum ditemukan, setidaknya sampai karya ilmiah ini dibuat. Ciri inilah yang membedakan karya ilmiah ini dengan karya-karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis merasa karya ilmiah ini akan menjadi yang pertama – setidaknya di IFTK Ledalero – mengangkat persoalan urgensi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif oposisi ala Nurcholish Madjid.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab utama, antara lain: Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Berikutnya, bab kedua berbicara mengenai konsepsi partai oposisi. Pada bab kedua ini, penulis menghadirkan pengertian, tugas, dan fungsi partai oposisi, pengertian oposisi dalam demokrasi, serta sejarah perkembangan partai oposisi di Indonesia.

Selanjutnya, bab ketiga berisikan pandangan Nurcholish Madjid tentang partai oposisi. Pada bagian ini, pertama-tama penulis akan menghadirkan riwayat hidup dan karya-karya Nurcholish Madjid semasa hidupnya. Selain itu, penulis juga akan mengulas konteks historis pemikiran Nurcholish Madjid, dan terakhir penulis akan menjelaskan pandangan oposisi ala Nurcholish Madjid.

Kemudian, pada bab keempat, penulis akan menganalisa polemik nasib partai oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada bagian ini, penulis akan mengulas situasi perpolitikan tanah air berkaitan dengan kebijakan politis Prabowo-Gibran terhadap nasib partai oposisi. Dari situasi yang ada, barulah penulis akan membuat analisis kritis terhadap upaya-upaya pelemahan dan penghapusan partai oposisi di Indonesia dan mengapa parpol oposisi urgen bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif oposisi Nurcholish Madjid. Pada bagian ini juga, penulis akan menyinggung perihal prinsip demokrasi sebagai *the way of life* menurut pandangan Nurcholish Madjid.

Terakhir, bab lima berisikan kesimpulan-kesimpulan umum atas pandangan oposisi Nurcholish Madjid dan kritik terhadap nasib partai oposisi pada pemerintahan Probowo-Gibran. Selain itu, bab ini juga memuat beberapa saran kepada beberapa pihak terkait penelitian dengan tema serupa di masa depan.